

TANTANGAN DAN ANCAMAN *TRIPLE DISRUPTION* DALAM PERCEPATAN AKSELERASI PEMBANGUNAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

CHALLENGES AND THREATS OF *TRIPLE DISRUPTION* IN ACCELERATING THE DEVELOPMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN EAST SUMBA DISTRICT

Fransiskus Xaverius Candra Gunawan

Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Timur

ABSTRAK

Dinamika global yang dinamis telah menghantar peradaban pada kehidupan normalitas baru dengan segala konsekuensinya. Realita ini telah memasuki Kabupaten Sumba Timur, dimana kemajuan teknologi informasi telah membuat berbagai layanan semakin mudah dan cepat. Namun, terdapat potensi ancaman *triple disruption*, khususnya para pelaku usaha, yakni adanya pesaing-pesaing baru yang membuat peta persaingan semakin kompetitif. Tujuan penelitian adalah menganalisa sejauh mana kesiapan BUM Desa menghadapi ancaman dan tantangan tersebut, khususnya keterampilan terkini para pengurus. Obyek penelitian dilakukan pada 6 BUM Desa aktif yang memiliki usaha produktif dan akses internet. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*). Hasil penelitian menemukan para pengurus BUM Desa memiliki keterampilan terkini yang rendah yang berdampak belum optimalnya pemanfaatan kemajuan digitalisasi untuk kemajuan usaha masyarakat. Selain itu, terdapat kelompok usaha masyarakat yang dapat menjadi embrio bagi pembentukan perekonomian komunitas desa. Namun, hal ini belum terkelola dengan baik yang menyebabkan masyarakat masih terjat dalam kemiskinan. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah menghadapi *triple disruption* adalah *pertama*, meningkatkan keterampilan terkini pengurus guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan digital. *Kedua*, memberdayakan kelompok usaha masyarakat dalam suatu komunitas yang saling terintegrasi dan bersinergi membangun perekonomian desa yang mandiri, berdaulat dan berkeadilan.

Kata kunci : triple disruption, keterampilan terkini, BUMDesa, sumberdaya manusia, sumba timur

ABSTRACT

Dynamic global dynamics have led civilization to a new normal life with all its consequences. This reality has entered East Sumba Regency, where advances in information technology have made various services easier and faster. However, there is a potential threat of triple disruption, especially for business actors, namely the presence of new competitors which make the competition map even more competitive. The aim of the research is to analyze the extent of BUM Desa's readiness to face these threats and challenges, especially the current skills of the administrators. The research objects were carried out at 6 active BUM Desa's that had productive businesses and internet access. The method used is descriptive qualitative with SWOT analysis techniques (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*). The results of the research found that BUM Desa administrators had low levels of current skills which had the impact of not optimally utilizing advances in digitalization for the advancement of community businesses. Apart from that, there are community business groups that can become embryos for the formation of village community economies. However, this has not been managed well, causing people to remain trapped in poverty. This research recommends for regional governments in face triple disruption, firstly, improving the latest skills of administrators to optimize the use of information and digital technology. Second, empowering community business groups in a community that is integrated with each other and synergizes to build an independent, sovereign and just village economy.

Keywords: triple disruption, current skills, BUM Desa, human resources, East Sumba.

I. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mengamankan peran dan fungsi Lembaga ini sebagai motor penggerak perekonomian desa. Namun, sebagian besar BUM Desa di Indonesia masih memiliki permasalahan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya kapasitas kelembagaan dan masih terjadi kesalahan paradigmatik dalam praktik pengelolaan. Putra *et al* (2019) mengatakan meningkatnya BUM Desa secara kuantitas tidak disertai dengan peningkatan secara kualitas, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara rutin untuk meningkatkan kinerja.

Hal serupa dialami sebagian besar BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur, dimana sejak pembentukan pada tahun 2017, baru terdapat 33 BUM Desa atau 24 persen yang berbadan hukum dan 76 persen lainnya sedang dalam proses pengajuan badan hukum (DPMD, 2023). Hal ini menggambarkan lemahnya kesiapan kelembagaan BUM Desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai sokoguru perekonomian rakyat. Selain itu, adanya masalah *triple disruption* menjadi ancaman dan tantangan sendiri bagi keberlanjutan BUM Desa yang perlu disikapi serius oleh Pemerintah Daerah dan Desa serta pemangku kepentingan lainnya.

Winanti *et al* (2021) menjelaskan *triple disruption* sebagai gejala dinamika global yang mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Pada tatanan ekonomi, hal tersebut telah menginisiasi lahirnya model bisnis baru yang mengedepankan strategi dan inovasi, meliputi : *digital disruption*, yakni gangguan yang diakibatkan adanya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang begitu pesat, dimana penguasaan transformasi data secara digital menjadi keunggulan kompetitif. Selain itu, *pandemic disruption* merupakan dampak adanya pandemi covid19 yang membutuhkan kemampuan adaptasi terhadap kehidupan normalitas baru, dan 3) *milenial disruption* adalah gangguan-gangguan yang terjadi di era milenial, seperti perubahan iklim yang mengancam kehidupan manusia. Pada poin ini "*disruption*" dipandang sebagai tanggungjawab sosial dalam menjaga bumi dan alam.

Hasil penelitian yang dilaporkan oleh Bagis *et al* (2023) menjelaskan kemampuan bertahan para pelaku usaha kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat di tengah perubahan lingkungan bisnis sangat ditentukan oleh pemanfaatan modal maya yang meliputi modal intelektual, modal sosial dan modal kredibilitas. Begitupun dengan Riorini *et al* (2019) yang mengatakan ancaman dan tantangan *triple disruption* telah menjadi realita kehidupan yang berujung pada siapa yang "kalah" dan "menang". Hal ini menjelaskan strategi yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi gejala perubahan global ini adalah menerapkan inovasi yang lebih inovatif dan berdayaguna.

Pembelajaran menarik ditemukan pada laporan Utami & Arimbi (2021) yang menjelaskan pentingnya peran komunitas menghadapi *triple disruption*, yakni para pelaku UMKM yang merupakan pekerja eks migran di Kabupaten Banyumas mampu bertahan di tengah krisis ekonomi melalui pendayagunaan komunitasnya. Strategi ini dapat menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Daerah dan Desa serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengupayakan peningkatan peran BUM Desa sebagai sokoguru perekonomian rakyat. Hal serupa juga ditemukan pada laporan penelitian Balitbangda (2020) yang mengatakan keberadaan 2 kelompok pengrajin tenun ikat yang mewakili *kabihu* Matolang dan Praikaraha di obyek wisata Kampung Adat Prailiu Kabupaten Sumba Timur mampu melewati masa sulit pandemi covid dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan digital untuk menjual produk tenun ikat secara *online*.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisa sejauhmana kesiapan BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur menghadapi tantangan dan ancaman *triple disruption*, khususnya keterampilan terkini para pengurus BUM Desa. Adapun obyek penelitian dilakukan pada 6 BUM Desa aktif yang memiliki usaha produktif dan akses internet, yaitu BUM Desa "Harapan Baru" di desa Pambotanjara Kecamatan Kota Waingapu, BUM Desa "Duma Luri" di desa Watu Hadang Kecamatan Umalulu, BUM Desa "Mbuhanng Pahamu" di desa Praibakul Kecamatan Haharu, BUM Desa "Palondalima Kuta" di desa Kuta, BUM Desa "Kawarahamu" di desa Hambapraing, dan BUM Desa "Hamu Eti" di desa Mondu Kecamatan Kanatang.

Penelitian dibatasi pada pembahasan aspek ekonomi sebagai salah satu sektor yang terdampak gangguan global. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai masukan untuk Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam menguatkan kelembagaan BUM Desa guna mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sumba Timur. Selain itu, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait strategi pengembangan BUM Desa menghadapi dinamika global yang semakin dinamis dan kompetitif.

II. METODE

Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif berdasarkan data primer dan sekunder yang bersumber dari dokumen Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), laporan hasil penelitian Balitbangda, buku dan artikel jurnal bereputasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisa data menggunakan analisis SWOT dengan pendekatan positivisme konstruktif yang bertujuan membangun konsep berpikir ilmiah terkait ancaman dan tantangan *triple disruption* yang dihadapi BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep *Triple Disruption*

Apabila dicermati, ancaman dan tantangan *triple disruption* merupakan situasi yang dapat menciptakan peluang bagi pelaku bisnis ataupun korporat untuk bergerak lebih maju yang disebabkan adanya berbagai kemudahan dalam akses layanan dan informasi (Prihanisetyo *et al.*, 2018). Namun, di satu sisi hal ini menuntut kepekaan dan dorongan yang kuat untuk membangun strategi dan inovasi yang tepat dengan tujuan mengantisipasi gejolak perubahan global. Hal ini pernah dilaporkan oleh Bagus *et al* (2023) yang mengatakan para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat telah memanfaatkan kemajuan digital untuk bertahan di tengah perubahan lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Selain itu, Riorini *et al* (2019) mengatakan realita persaingan bisnis di era milenial telah berdampak pada siapa yang “kalah” dan “menang”.

Winanti *et al* (2021) mengatakan berkembangnya teknologi digital kontemporer seperti kecerdasan artifisial (*artificial intelligence/AI*), 3D printing, otomasi, robotik, dan ‘*Internet of Things*’ telah mengubah tatanan sosial, politik dan ekonomi secara radikal berbagai aspek kehidupan manusia, dimana perubahan ini tidak hanya mengubah pola pikir, namun juga berimbas bagaimana cara manusia berinteraksi. Hal ini nampak pada transformasi digital yang membuat perubahan sistem tata kelola menjadi lebih efektif dan efisien. Di satu sisi, situasi ini menggambarkan adanya peluang pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berdaulat. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ancaman dan tantangan baru, yakni digital kolonialisme dan kesenjangan akses.

Selain itu, dampak pandemi covid 19 secara nyata telah menghadirkan ancaman tersendiri atau *pandemic disruption* yang menuntut adanya adaptasi normalitas baru dalam berbagai sistem kehidupan yang lebih *smart*, kompetitif dan dinamis. Snell & Bohlander (2013) menjelaskan hal ini sebagai berikut :

“The strategies carried out by companies today increasingly involve one or more elements of globalization. Economic integration and world markets have pushed the business world abroad to seek opportunities and fend off foreign competitors at home. Consumers around the world want to be able to buy “anything, anytime, anywhere,” and companies are now enabling them to do just that”.

Hal tersebut mengandung makna bahwa model bisnis secara global dan lokal telah berubah, dimana perilaku pasar atau konsumen ingin dapat membeli “apa saja, kapan saja, di mana saja,” dan perusahaan kini memungkinkan mereka untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan oleh perusahaan saat ini harus dapat melibatkan satu atau lebih unsur globalisasi untuk meningkatkan inklusivitas dan responsibilitas dengan

tujuan mendorong dunia bisnis di luar negeri untuk mencari peluang dan menangkis pesaing asing di dalam negeri. Dalam konteks pengelolaan BUM Desa, paradigma berpikir ini dapat diimplementasikan melalui pengintegrasian ekonomi lokal dan pasar dunia yang saling bersinergi (Gunawan *et al.*, 2024).

Situasi *pandemic disruption* menurut Winanti *et al* (2021) telah membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sistem kesehatan yang lebih universal serta industri kesehatan domestik yang lebih kuat. Begitupun dengan adaptasi terhadap *mileneal disruption*, khususnya dampak perubahan iklim yang menjadi kebutuhan absolut dan membutuhkan suatu *grand design* kebijakan yang humanis dan berkelanjutan dengan fokus pada *green economy* sebagai *mainstream ideology*. Hal serupa juga ditampilkan dalam ulasan laman web Kompas.com (2021) yang menganalisa adanya tren positif dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kontribusi ekonomi digital bagi perekonomian Indonesia
Sumber : Report 2 Kompas.com (2021)

Nampak, perkembangan ekonomi Indonesia memiliki peluang yang lebih besar apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di asia tenggara. Data e-Conomy SEA2020 dalam Report Kompas.com (2021) memprediksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia di tahun 2030 akan mengalami peningkatan dari 4 % atau Rp. 632 triliun pada tahun 2020 menjadi 18 % atau Rp. 4.531 triliun. Hal ini menggambarkan adanya harapan positif dan optimisme untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi. Begitupun, dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang diprediksi berkembang lebih pesat di asia tenggara, artinya terdapat peluang yang baik bagi pertumbuhan usaha, khususnya pelaku usaha BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur.

b. Peranan Pemerintah Daerah dan Desa dalam Memperkuat Fungsi Kelembagaan BUM Desa.

Ujung tombak keberhasilan pembangunan perekonomian desa sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan BUM Desa, dimana peran strategis lembaga ini adalah pengelolaan usaha desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Prasetyo, 2019; Putra *et al.*, 2019). Oleh karena itu, profesionalitas dan kelengkapan legalitas badan usaha sudah seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan Desa, seperti adanya Peraturan Desa (Perdes) dan legalisasi badan hukum sebagai landasan kerja BUMDesa. DPMD (2022) menunjukkan data 140 BUM Desa yang dibentuk sejak tahun 2017, hanya terdapat 80 BUM Desa atau 57,14 persen yang tercatat sebagai BUM Desa aktif, yakni 57 BUM Desa telah mendapatkan nama badan usaha, 12 BUM Desa telah berbadan hukum dan 11 BUM Desa masih dalam proses pengurusan kelengkapan administrasi badan usaha.

Hal fundamental yang perlu dipahami dalam pengelolaan BUM Desa adalah peran utama sebagai sokoguru perekonomian rakyat, dimana BUM Desa merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2021 tentang Badan Usaha Milik Desa mengamanatkan perlunya kemandirian dalam pengelolaan usaha dengan memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

c. Diskusi

1. Keadaan BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur : Masalah dan Ancaman

DPMD (2023) menyebutkan sebanyak 140 BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur telah memiliki Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) serta program kerja tahunan. Namun, baru sebanyak 33 BUM Desa atau 24 persen yang telah berbadan hukum dan 76 persen BUM Desa lainnya sedang dalam proses pengajuan badan hukum pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Hasil riset yang dilaksanakan dari bulan November 2023 sampai Januari 2024 menunjukkan sebagian besar pengurus BUM Desa di 30 BUM Desa aktif belum maksimal memanfaatkan ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk kemajuan usaha. Hal ini menunjukkan adanya masalah dan potensi ancaman bagi keberlanjutan organisasi yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah dan Desa serta Pemangku kepentingan lainnya, khususnya penguasaan keterampilan terkini. Selain itu, sebagian besar pengurus memiliki pengalaman kerja yang minim, baik itu bekerja di luar BUM Desa maupun di dalam BUM Desa berdasarkan perhitungan masa kerja 5 tahun.

Narasumber BJ/53 tahun/L seorang petani di desa Watu Hadang yang menduduki jabatan Direktur BUM Desa mengatakan, “Sejak reorganisasi dan terbentuknya kepengurusan yang baru, belum ada program dan kegiatan yang dijalankan oleh kami (pengurus), dimana sebagian besar anggota kelompok bekerja sebagai petani dan pengrajin tenun ikat”. Hal serupa juga nampak di desa lainnya yang menunjukkan permasalahan yang sama dan menggambarkan rendahnya sinergitas antar fungsi dalam membangun BUM Desa.

Hasil observasi menggambarkan sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sumber pendapatan ekonomi rumah tangga dari bertani dan menenun tenun ikat sumba. Mereka menceritakan sebelum krisis pandemi, keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan kain tenunan dapat menafkahi keluarga, bahkan untuk membiayai anak sekolah (perguruan tinggi). Namun, sekarang sangat terasa sekali dampaknya dan mereka hanya bertahan hidup dengan mengandalkan hasil panen padi. Hal serupa juga dilaporkan oleh Balitbangda Sumba Timur di tahun 2021 pada penelitian tentang Petani dan Kemiskinan di desa Mutunggeding Kecamatan Umalalu dan desa Laihau Kecamatan Lewa Tidahu.

Di sisi lain, permasalahan krusial yang dihadapi manajemen BUM Desa adalah konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang menghambat kreatifitas pengurus dalam mengelola BUM Desa. Hal ini nampak dalam peran Kepala Desa yang sangat mendominasi peran antar fungsi dalam struktur organisasi. Selain itu, rendahnya tingkat kesejahteraan yang didapatkan dari BUM Desa menyebabkan sebagian pengurus tidak fokus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, artinya profesionalisme pengelolaan manajemen perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya guna mencegah kerentanan organisasi di masa depan.

2. Tantangan dan Peluang di Era Mileneal

Saat ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui program peningkatan pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) telah menginisiasi optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pembangunan desa. Hal ini meliputi konsep penerapan *smart villlage* atau desa cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan pencapaian SDGs desa. Selain itu, program ini juga bertujuan

untuk meningkatkan literasi digital dan pemberdayaan digital guna menjalin kemitraan dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan lokal desa.

Hal menarik ditemukan pada manajemen BUM Desa di desa Praibakul Kecamatan Haharu, dimana Pemerintah Desa dan pengelola BUM Desa telah menginisiasi terbentuknya komunitas petani dalam suatu wadah ekonomi produktif memanfaatkan potensi desa, yakni produk kacang tanah olahan. Narasumber J/43 tahun/L seorang pendamping desa menceritakan “Dulunya, para petani menjual hasil panen kacang tanah mentah ke kota Waingapu, namun sekarang mereka (petani) kami bimbing untuk menjadi pelaku UMKM itu sendiri dengan target pasar adalah masyarakat desa dan kota”. Secara eksplisit, data empirik ini menggambarkan adanya suatu pola inovasi yang mampu memaksimalkan pemanfaatan hasil pertanian menjadi komoditi yang bernilai jual tinggi.

Begitupun yang telah dilakukan Pemerintah desa Pambotanjara Kecamatan Kota Waingapu dan desa Kuta Kecamatan Kanatang yang telah menginisiasi pengembangan sektor kepariwisataan sebagai program unggulan desa, selain sektor pertanian. Namun, masih terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan obyek wisata, dimana mereka (para pengurus BUM Desa) menceritakan situasi rendahnya kunjungan wisatawan, khususnya pasca pandemi covid masih menjadi masalah. Dalam amatan, terdapat fasilitas sarana prasarana yang telah dibangun Pemerintah Daerah untuk menunjang kegiatan kepariwisataan di kedua lokasi wisata ini. Namun, belum berdayaguna bagi pengembangan ekonomi masyarakat lokal yang nampak pada minimnya para pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan.

Adapun keunggulan obyek wisata di desa Pambotanjara adalah indahnnya hamparan perbukitan seperti seorang raksasa yang sedang tidur dihiasi indahnnya rerumputan savana. Aktivitas usaha masyarakat meliputi 1 pelaku usaha lokal yang menyediakan jasa kedai atau warung kopi dengan menu makanan yang terbatas dan beberapa anggota masyarakat yang menyediakan jasa penunggang kuda bagi para pengunjung. Sedangkan obyek wisata desa Kuta lebih menampilkan kemolekan pantai dengan pasir putihnya yang menawan dan tidak terlihat adanya aktivitas usaha masyarakat dengan memanfaatkan potensi wisata ini.

Hal ini menjelaskan bagaimana pentingnya peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur untuk mendorong kemajuan sektor kepariwisataan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memaksimalkan potensi jalan Malioboro sebagai daya tarik wisata unggulan ataupun pada daerah-daerah lain yang telah berhasil menemukan keunggulan kompetitifnya sebagai daya tarik wisata. Oleh karena itu, maka implikasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui program pemberdayaan dan secepatnya membangun *smart villlage* yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai cara terbaik untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi lokal desa yang dimiliki.

3. Penguatan Peran Komunitas sebagai Strategi Adaptif menghadapi *Triple Disruption*

Keberadaan BUM Desa mengemban amanah yang tidak hanya berfungsi sebagai *corporate* yang hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berperan sebagai organisasi kemasyarakatan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan komunitas lokal menjadi landasan pijak bagi pengembangan BUM Desa untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Namun, maksud dan tujuan tersebut seringkali terabaikan sehingga membuka peluang munculnya pesaing luar yang menguasai perekonomian pedesaan.

Strategi yang dapat dijalankan oleh BUM Desa mengatasi masalah dan ancaman adalah dengan mengedepankan optimalisasi pemanfaatan kemajuan

teknologi dan informasi melalui *smart village*. Dalam amatan dan wawancara menemukan hampir semua kegiatan usaha produktif masyarakat lokal belum terintegrasi dalam suatu sistem pengembangan ekonomi yang terkoneksi dengan pasar lokal maupun global, Selain itu, terdapat peluang yang besar bagi pengembangan potensi desa dengan nilai jual tinggi, khususnya di sektor pertanian dan pariwisata. Secara geografis, keenam desa tersebut memiliki letak yang mudah dijangkau dan ditunjang adanya sarana prasarana jalan yang memadai yang menjadi kekuatan potensial dalam membangun perekonomian masyarakat.

Pertanyaan kritis yang muncul adalah “Mengapa tidak dibentuk adanya komunitas usaha produktif bagi masyarakat lokal yang saling terkoneksi dan bersinergi?”. (Utami & Arimbi, 2021) mengatakan pentingnya peran komunitas menghadapi *triple disruption*, dimana para pelaku UMKM yang merupakan pekerja eks migran di Kabupaten Banyumas mampu bertahan di tengah krisis ekonomi melalui pendayagunaan komunitasnya. Selain itu, hasil penelitian Balitbangda (2020) di obyek wisata Kampung Adat Prailiu menemukan hal menarik lainnya bahwa kemampuan bertahan hidup kelompok pengrajin tenun ikat terletak pada optimalisasi pemanfaatan kemajuan digitalisasi, dimana komunitas mampu mengkoneksikan jejaring yang ada dan melakukan penawaran dan transaksi penjualan secara *online*.

Dalam amatan, embrio komunitas itu sebenarnya sudah ada pada beberapa BUM Desa, seperti kelompok usaha petani kacang tanah di desa Praibakul, kelompok pengrajin tenun ikat di desa Mondu, desa Hambapraing dan desa Watu Hadang, dan kelompok penggiat wisata di desa Pambotanjara. Namun, keberadaan kelompok-kelompok usaha ini belum berdaya menghadapi tantangan dan ancaman *triple disruption* yang secara langsung mengganggu perekonomian. Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Gunawan *et al* (2024) melaporkan bahwa para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Daerah dan Desa perlu merancang suatu konsep *mitigasi* terkait ancaman global terhadap keberadaan BUM Desa di sumba timur, yakni dengan cara meningkatkan sinergitas antar fungsi yang saling terkoneksi berdasarkan keunggulan kompetitif masing-masing desa dengan prinsip saling menguntungkan.

Apabila dicermati, hal tersebut di atas menunjukkan perlunya penguatan komunitas lokal sebagai basis pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, maka Pemerintah Daerah perlu merancang pembangunan sistem database potensi ekonomi desa yang terintegrasi secara online yang bertujuan meningkatkan inklusivitas dan sinergitas antar fungsi, dimana tantangan dan ancaman *triple disruption* sangat membutuhkan kerja cerdas dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mewujudkan BUM Desa yang kuat, mandiri dan profesional di Kabupaten Sumba Timur.

IV. KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan keadaan BUM Desa di Kabupaten Sumba Timur belum siap menghadapi ancaman dan tantangan *triple disruption*. Hal ini nampak pada rendahnya kapasitas kelembagaan dan minimnya keterampilan terkini pengurus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan digital untuk kemajuan usaha. Selain itu, keberadaan kelompok usaha dalam setiap BUM Desa belum mampu menampilkan kekuatan yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, maka peranan Pemerintah Daerah dan Desa sangat diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut guna mencegah potensi ancaman yang dapat terjadi, yakni munculnya pesaing luar yang dapat menghempaskan usaha masyarakat lokal.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah dan Desa perlu mengupayakan penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan dan pendampingan yang intensif dan berdayaguna berdasarkan keunggulan kopetitif. Hal ini tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dan niat baik dari semua pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja BUM Desa. Rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, khususnya 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), 2) Dinas Pariwisata, dan 3) Dinas Koperasi dan UKM sebagai

strategi adaptif menghadapi *triple disruption* adalah *pertama*, meningkatkan keterampilan terkini pengurus guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan digital. *Kedua*, memberdayakan kelompok usaha masyarakat lokal dalam suatu komunitas yang saling terintegrasi dan bersinergi membangun perekonomian desa yang mandiri, berdaulat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagis, A. A; Surasni, K; Santoso, B; Arifah, N. A. 2023. Membangun Viabilitas Bisnis Dengan Kekuatan Modal Maya Pelaku UKM di Era Triple Disruption: Kasus para Pelaku UMK di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Indonesia*, 4((1), 1–8. [https://doi.org/10.29303/jpmsi.v4i\(1\).174](https://doi.org/10.29303/jpmsi.v4i(1).174).
- Balitbangda. 2021. Laporan Hasil Penelitian Penerapan Community Based Tourism di Obyek Wisata Kampung Adat Prailiu. Balitbangda Sumba Timur. Waingapu.
- Balitbangda. 2022. Laporan Hasil Penelitian Petani dan Kemiskinan di desa Mutunggeding dan desa Laihau. Balitbangda Sumba Timur. Waingapu.
- BPS. 2022. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- DPMD. 2022. Data Badan Usaha Milik Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur. Waingapu.
- DPMD. 2023. Data Badan Usaha Milik Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur. Waingapu.
- Gunawan, Fransiskus; Ali, Hapzi; Wihadanto, Ake. 2024. The Influence of Interpersonal and Current Skills on The Performance of Village Owned Businesses in East Sumba Regency Through Good Corporate Governances. *Dinasti International Journal Of Economics, Finance, And Accounting (DIJEFA)*. Dinasti Publisher. Vol. 5, No. 1, March 2024. DOI: <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i2>.
- Kemendesa. 2023. Rekrutmen Duta Digital 2023. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. <http://rekrutmendutadigital.kemendesa.go.id/>. Diakses tanggal 22-02-2024.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara RI Nomor 6623. Jakarta.
- Prihanisetyo, Adi; Pebrianto, Dede; Fitriasari, Pipin. 2018. Era Disruption Sebuah Tantangan Atau Bencana Sebuah Telaah Literatur. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran. DOI: 10.33005/mebis.v3i1.19.
- Putri, Sofie Yunida. 2019. Digital Disruption: Peluang Atau Ancaman Bagi Eksistensi Profesi Akuntan Di Masa Depan. *Behavioral Accounting Journal*. Vol. 2, No. 2, Desember 2019. e-ISSN: 2615-7004.
- Riorini, Sri Vandayuli, *et al.* 2019. Manajemen Perubahan Era Disruption. Ideas Publishing. ISBN : 978-602-5878-51-0. Gorontalo.
- Scott & Bohlander. 2013. Managing Human Resources. South-Western Cengage Learning. ISBN 13: 978-1-111-53282-6. USA.
- Widyawati, Sri Utami; Fahira, Rahma; Rushartami, Meidina Arimbi; Fakhira, Novsa. 2021. The Role of Sme's Community Facing Triple Disruption (a Study of Ex-Migrant Workers Community). *International Sustainable Competitiveness Advantage*.
- Winanti, Poppy S; Mas'udi, Wawan; Mugasejati, Nanang P. 2021. Triple Disruption : Karakteristik, Wujud, dan Implikasinya. E-book Series 01/Nov/2021. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.